

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen
	2	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100 persen
	3	Jumlah Desa yang Dibina	100 persen
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	IKU Strategis: 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Persentase Koordinasi yang terlaksana 3. Jumlah Desa yang Dibina		

Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen
	2	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100 persen
	3	Jumlah Desa yang Dibina	100 persen
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat		
	IKU Strategis: 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		

Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen
	2	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100 persen
	3	Jumlah Desa yang Dibina	100 persen
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah		
	IKU Strategis: 1. Persentase Koordinasi yang terlaksana		

Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2025		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Barat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 persen
	2	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100 persen
	3	Jumlah Desa yang Dibina	100 persen
Informasi lain:			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	IKU Strategis: 1. Jumlah Desa yang Dibina		

Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Barang Milik Daerah 4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan 2. Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Kegiatan: 1. Pemberdayaan Kelurahan	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Kegiatan: 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Kegiatan: 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	


Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ida Bagus Made Purwanasara", is written over the stamp.

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatn Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. 4. 5.
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Barang Milik Daerah 4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah	
<p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 197904111998021001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatn Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan 2. Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	
<p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP., M.Si</u> NIP. 197904111998021001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Kegiatan: 1. Pemberdayaan Kelurahan	
		Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	
 <p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p> <p><u>Iga Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 197904111998021001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data	Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan: 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si NIP. 197904111998021001</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p>  </div> </div>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	
<p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP., M.Si</u> NIP. 197904111998021001</p>			

Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Barat	
Sumber Data		Renstra Kecamatan Denpasar Barat 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program Kecamatan Denpasar Barat (Renja tahun 2022)		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	2	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Barat	83
	3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%
	4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	5	Persentase Kewenangan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%
	6	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan: 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	
<p>Denpasar, 8 April 2025 Camat Denpasar Barat</p>  <p><u>Iga Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si</u> NIP. 197904111998021001</p>			

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar										
Nama OPD	: Kecamatan Denpasar Barat										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan										
Urusan Pemerintahan	: Wilayah										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan										
	Sasaran: 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Koordinasi yang terlaksana 3. Jumlah Desa yang dibina									
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.41.37.01	Kasubag dan Bendahara Gaji	Jumlah gaji yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya	Eksternal	UC	Gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan	Kasubag, Bendahara Gaji, dan Pegawai yang bersangkutan	
			Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.25.41.37.01	Sekcam	Terlambatnya proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Kasubag dan Bendahara Gaji	
			Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF.25.41.37.02	Sekcam	Kurangnya anggaran gaji dalam satu tahun karena adanya mutasi pegawai	Internal	C	Proses pembayaran gaji terlambat	Kasubag dan Bendahara Gaji	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan ril	ROO.25.41.37.02	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rasionalisasi anggaran yang cukup besar dalam proses perencanaan anggaran	Eksternal	C	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal	Camat	
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.03	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat	
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.03	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat	
			Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.04	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Internal	C	Perencanaan penganggaran yang tidak tepat	Camat	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.25.41.37.04	Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Camat	

			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.05	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.05	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.06	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.25.41.37.06	Kasubag Umum & Kepegawaian	Keterlambatan Pengumpulan Absensi	Internal	C	Menurunnya Kinerja Tenaga Non ASN	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.07	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.07	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.08	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.25.41.37.08	Kasi Kesra	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.09	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.09	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.10	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan		Koordinasi di tingkat Kecamatan Belum Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.10	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Terhadap Proses Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kota	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.11	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.11	Kasi PM	Penentuan prioritas pembangunan yang belum merata	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Camat
			Suap dalam proses pengadaan barang & jasa terkait pelayanan publik	RF.25.41.37.12	Kasi PM	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat		Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat belum Maksimal	ROO.25.41.37.12	Kasi Pel Um	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survey Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	C	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.13	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.25.41.37.13	Kasi Pel Um	Pemahaman atau pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi yang masih rendah	Eksternal		Pelayanan yang tidak maksimal atau tidak adil	Masyarakat
			Suap dalam proses pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RF.25.41.37.14	Kasi Pel.Um	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.25.41.37.14	Lurah	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	C	Serapan Anggaran Rendah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.15	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait pemberdayaan kelurahan	RF.25.41.37.15	Lurah	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang kurang maksimal	Camat
			Suap dalam proses pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.16	Lurah	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.16	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Eksternal	C	Ketentraman dan ketertiban terganggu	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.17	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.25.41.37.17	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Adanya oknum yang masih menerima suap	Eksternal	C	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah	Camat
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF.25.41.37.18	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar belum Maksimal	ROO.25.41.37.18	Kasi Pem	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	C	Realisasi kegiatan terhambat	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.19	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.19	Kasi Pem	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan yang kurang maksimal	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF.25.41.37.20	Kasi Pem	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak terlaksana	ROO.25.41.37.20	Kasi PM	Kelemahan Tim Pembina dan Pengawasan desa di Kecamatan karena kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan yang masih rendah	Internal	C	Adanya desa yang belum tertib administrasi	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.21	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me-reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.21	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Desa dan Terjadinya Persepsi yang Berbeda Terhadap Aturan - Aturan Secara Normatis Sehingga Proses Administrasi di Desa terjadi Kekeliruan	Eksternal	C	Kekeliruan desa dalam Mengeksekusi Kegiatan Secara Adminitrasi	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.22	Kasi PM	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Kecamatan Denpasar Barat
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
 Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah
 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Urusan Pemerintahan : Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.41.37.01	Kasubag dan Bendahara Gaji	Jumlah gaji yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah realisasi tahun sebelumnya	Eksternal	UC	Gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan	Kasubag, Bendahara Gaji, dan Pegawai yang bersangkutan	
			Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.25.41.37.01	Sekcam	Terlambatnya proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Kasubag dan Bendahara Gaji	
			Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF.25.41.37.02	Sekcam	Kurangnya anggaran gaji dalam satu tahun karena adanya mutasi pegawai	Internal	C	Proses pembayaran gaji terlambat	Kasubag dan Bendahara Gaji	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.25.41.37.02	Kasubag Umum & Kepegawaian	Rasionalisasi anggaran yang cukup besar dalam proses perencanaan anggaran	Eksternal	C	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal	Camat	
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.03	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat	
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.03	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat	
			Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.04	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Internal	C	Perencanaan penganggaran yang tidak tepat	Camat	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.25.41.37.04	Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Camat	
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.05	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat	

			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.05	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.06	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.25.41.37.06	Kasubag Umum & Kepegawaian	Keterlambatan Pengumpulan Absensi	Internal	C	Menurunnya Kinerja Tenaga Non ASN	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.07	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.07	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.08	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.25.41.37.08	Kasi Kesra	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.09	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.09	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.10	Kasi Kesra	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	Koordinasi di tingkat Kecamatan Belum Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.10	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Terhadap Proses Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kota	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.11	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.11	Kasi PM	Penentuan prioritas pembangunan yang belum merata	Eksternal	C	Kurang Puasnya Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Camat

			Suap dalam proses pengadaan barang & jasa terkait pelayanan publik	RF.25.41.37.12	Kasi PM	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat belum Maksimal	ROO.25.41.37.12	Kasi Pel Um	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survey Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	C	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.13	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.25.41.37.13	Kasi Pel Um	Pemahaman atau pengetahuan tentang pengendalian gratifikasi yang masih rendah	Eksternal		Pelayanan yang tidak maksimal atau tidak adil	Masyarakat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RF.25.41.37.14	Kasi Pel.Um	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.25.41.37.14	Lurah	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	C	Serapan Anggaran Rendah	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.15	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait pemberdayaan kelurahan	RF.25.41.37.15	Lurah	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang kurang maksimal	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.16	Lurah	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.16	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Eksternal	C	Ketentraman dan ketertiban terganggu	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.17	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.25.41.37.17	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Adanya oknum yang masih menerima suap	Eksternal	C	Ketidapercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah	Camat

			Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF.25.41.37.18	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar belum Maksimal	ROO.25.41.37.18	Kasi Pem	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	C	Realisasi kegiatan terhambat	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.19	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.19	Kasi Pem	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan yang kurang maksimal	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF.25.41.37.20	Kasi Pem	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak terlaksana	ROO.25.41.37.20	Kasi PM	Kelemahan Tim Pembina dan Pengawasan desa di Kecamatan karena kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan yang masih rendah	Internal	C	Adanya desa yang belum tertib administrasi	Camat
			Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.21	PPTK	PPK lalai atau lupa dalam menyetujui / me reviu paket	Internal	C	Paket gagal dan harus mengulangi proses dari awal	Camat
			Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.21	Kasi PM	Kurangnya Pemahaman Desa dan Terjadinya Persepsi yang Berbeda Terhadap Aturan - Aturan Secara Normatis Sehingga Proses Administrasi di Desa terjadi Kekeiruan	Eksternal	C	Kekeiruan desa dalam Mengeksekusi Kegiatan Secara Adminitrasi	Camat
			Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.22	Kasi PM	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	C	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Camat

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar			
Tahun Penilaian		: 2025			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
III	Risiko Operasional OPD				
1	Penyediaan Barang Milik Daerah tidak dapat terealisasi	ROO.25.41.37.04	3	3	9
2	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.05	3	3	9
3	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.25.41.37.08	3	3	9
4	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.09	3	3	9
5	Koordinasi di Tingkat Kecamatan belum terlaksana dengan baik	ROO.25.41.37.10	2	2	4
6	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.11	2	2	4
7	Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat belum maksimal	ROO.25.41.37.12	2	2	4
8	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.13	2	2	4
9	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan rendah	ROO.25.41.37.14	2	2	4
10	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.15	2	2	4
11	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.41.37.01	2	1	2
12	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.25.41.37.02	2	1	2
13	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.03	2	1	2
14	Keterlambatan pembayaran gaji kontrak	ROO.25.41.37.06	2	1	2
15	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.07	2	1	2
16	Koordinasi penerapan dan penegakan Perda Perkada tidak terlaksana dengan baik	ROO.25.41.37.16	1	2	2
17	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.17	1	2	2

18	Pembinaan dan Pengawasan desa tidak terlaksana	ROO.25.41.37.20	1	2	2
19	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.21	1	2	2
20	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar belum maksimal	ROO.25.41.37.18	1	1	1
21	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.19	1	1	1
IV	Risiko Fraud OPD				
1	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.05	3	3	9
2	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.09	3	3	9
3	Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.11	2	2	4
4	Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.25.41.37.13	2	2	4
5	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait pemberdayaan kelurahan	RF.25.41.37.15	2	2	4
6	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.19	2	2	4
7	Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.25.41.37.01	2	1	2
8	Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF.25.41.37.02	2	1	2
9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.03	2	1	2
10	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.04	2	1	2
11	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.06	2	1	2
12	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.07	2	1	2
13	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.08	2	1	2
14	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.10	2	1	2
15	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.12	2	1	2

16	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RF.25.41.37.14	2	1	2
17	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.16	2	1	2
18	Gratifikasi dalam proses penganggaran barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF.25.41.37.18	2	1	2
19	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF.25.41.37.20	2	1	2
20	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.22	2	1	2
21	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.25.41.37.17	1	2	2
22	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.21	1	2	2



Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat

[Signature]
Iga Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

NIP. 197904111998021001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
II	Risiko Operasional OPD					



Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si

NIP. 197904111998021001

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
II	Risiko Strategis OPD						
II	Risiko Operasional OPD						

Denpasar, 8 April 2025
 Camat Denpasar Barat



Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
 NIP. 197904111998021001

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h



Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat

(Signature)
Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g



Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat

(Handwritten signature)
Ida Bagus Made Purwanasara, S.STP.,M.Si
NIP. 197904111998021001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan								
Urusan Pemerintahan		: Kewilayahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
II	Risiko Strategis OPD									
1										
III	Risiko Operasional OPD									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.41.37.01					NIHIL			
2	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.25.41.37.02					NIHIL			
3	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.03					NIHIL			
4	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	ROO.25.41.37.04					NIHIL			
5	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.05					NIHIL			
6	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	ROO.25.41.37.06					NIHIL			
7	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.07					NIHIL			
8	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	ROO.25.41.37.08					NIHIL			
9	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.09					NIHIL			
10	Koordinasi di tingkat Kecamatan Belum Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.10					NIHIL			
11	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.11					NIHIL			
12	Pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat belum Maksimal	ROO.25.41.37.12					NIHIL			
13	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.13					NIHIL			
14	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	ROO.25.41.37.14					NIHIL			
15	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.15					NIHIL			
16	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada tidak Terlaksana dengan Baik	ROO.25.41.37.16					NIHIL			
17	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.17					NIHIL			
18	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar belum Maksimal	ROO.25.41.37.18					NIHIL			
19	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.19					NIHIL			
20	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak terlaksana	ROO.25.41.37.20					NIHIL			
21	Kegagalan dalam proses e-purchasing	ROO.25.41.37.21					NIHIL			
IV	Risiko Fraud OPD									
1	Gratifikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.25.41.37.01					NIHIL			
2	Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	RF.25.41.37.02					NIHIL			
3	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.03					NIHIL			
4	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.04					NIHIL			
5	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.05					NIHIL			
6	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.06					NIHIL			
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.41.37.07					NIHIL			
8	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.08					NIHIL			
9	Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.09					NIHIL			
10	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.25.41.37.10					NIHIL			
11	Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.11					NIHIL			

12	Suap dalam proses pengadaan barang & jasa terkait pelayanan publik	RF.25.41.37.12	NIHIL
13	Gratifikasi atas pemberian layanan	RF.25.41.37.13	NIHIL
14	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	RF.25.41.37.14	NIHIL
15	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terakit pemberdayaan kelurahan	RF.25.41.37.15	NIHIL
16	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	RF.25.41.37.16	NIHIL
17	Suap dalam proses penindakan terhadap pelanggaran Perda Perkada	RF.25.41.37.17	NIHIL
18	Gratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penegakan Perda dan Perkada	RF.25.41.37.18	NIHIL
19	Gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa	RF.25.41.37.19	NIHIL
20	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	RF.25.41.37.20	NIHIL
21	Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.21	NIHIL
22	Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	RF.25.41.37.22	NIHIL

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan



Denpasar, 8 April 2025
Camat Denpasar Barat

Bagus Made Purwanasara, S.STP, M.Si

NIP. 197904111998021001